

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

Vritianita Lengka
NPP. 29.2000

*Asdaf Kabupaten Nduga Provinsi Papua
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: yugugwe@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on how the village head election is an activity that is carried out every six years in Jayawijaya Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to analyze whether the election of the village head, the term of office of the village head, and community participation in the election of the village head in Jayawijaya Regency were in accordance with the existing laws and regulations. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the participation theory of Milbrath in Maran. Data collection techniques using in-depth interviews (8 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that there was no election conducted but the village head was appointed directly by the Regent then the term of office of the village head was not only six years but even for life so that no community took part in participating in the implementation of the election. . **Conclusion:** Community participation in the election of village heads in Jayawijaya Regency has not been carried out properly because Law Number 6 of 2014 has not yet been implemented, which contains that village heads are directly elected by the community through elections. Efforts that have been made by the government in this regard are still not optimal and not well targeted

Keywords: Participation, Community, Election, Village Head

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada bagaimana pemilihan kepala kampung yang merupakan kegiatan yang dilakukan setiap enam tahun sekali pada Kabupaten Jayawijaya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah pemilihan kepala kampung, masa jabatan kepala kampung, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala

kampung di Kabupaten Jayawijaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori partisipasi dari Milbrath dalam Maran. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (8 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pemilihan yang dilakukan melainkan kepala kampung ditunjuk langsung oleh Bupati kemudian masa jabatan kepala kampung bukan hanya enam tahun bahkan ada juga sampai seumur hidup sehingga tidak ada masyarakat yang turut andil berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana didalamnya berisikan bahwa kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah terkair hal ini masih belum optimal dan belum tepat sasaran.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Pemilihan, Kepala Kampung

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom, Baik kepada daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/kota hal ini di ataur dalam Bab I pasal 1. Penyerahan berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan. Asas Undang-Undang baru untuk mengindahkan Undang-Undang lama yang mengatur tentang berbagai hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pada Bab I Pasal 1, yaitu: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, 2. Memilih pimpinan daerah, 3. Mengelola aparatur daerah, 4. Mengelola kekayaan daerah, 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah, 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah, 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah daerah juga memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut: 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi, 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan, 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, 6.

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas pelayanan umum yang layak, 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur Tentang Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Salah satunya adalah Kampung. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Badan Musyawarah Kampung (BMK). Badan Musyawarah Kampung adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung, dan kampung berada dibawah Distrik.

Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya masih sangat tradisional, dan memilih seseorang yang keturunannya berasal dan menetap dari daerah tersebut, dalam hal ini juga sangat menutamakan etnis atau kepala kampung harus orang suku asli daerah tersebut mengutamakan identitas politik tanpa memandang latar belakang pendidikan, kemampuan kepemimpinan, dan kualitas kinerja untuk membangun wilayah kampung tersebut. Pentingnya sistem demokrasi dan partisipasi masyarakat digunakan dalam pemilihan kepala kampung adalah agar terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan kampung untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin pemerintahan kampung yang bersih, dan juga administrasi kampung yang baik dan tertata agar dapat memajukan kampung.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Permasalahan)

Permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua yaitu Pasal 31 dan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 6 Tahun telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Kampung. Pertama, pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Kampung serentak ini ditetapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Kampung dipilih secara langsung oleh penduduk Kampung. Ketika ada partisipasi masyarakat dalam pemilihan maka akan terwujudnya sistem demokrasi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang, dan dapat menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat karena negara demokrasi memungkinkan setiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan menentukan pilihannya sendiri.

Namun meskipun begitu partisipasi masyarakat belum berjalan dengan baik karena kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, para pemula yang masih memiliki jiwa otonom yang tinggi, dukungan

yang kurang dari lingkungan, tidak adanya rangsangan politik bagi masyarakat, dan kurangnya pendidikan politik terlebih khusus tentang pentingnya keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala kampung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung. Penelitian Indra Norhayati berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013*, menemukan bahwasannya di Desa Pongkar sampel yang diambil sebanyak 85 orang yang ditentukan berdasarkan rumus, responden yang terdiri dari berbagai latar belakang yang baik dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, umur, dan pendidikan. Dari hasil kuesioner yang dilakukan terhadap responden, kemudian menghasilkan data yang kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan. Maka dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu; Tingkat partisipasi politik masyarakat desa pongkar pada tahun 2013 mencapai 74,02%.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Marselina Kareth yang berjudul *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)*. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, sifat apatis dari masyarakat itu sendiri, sosialisasi politik, distribusi surat suara yang masih belum efektif, peran media masa dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, serta kinerja dari komisi pemilihan umum daerah yang masih belum maksimal menyebabkan terjadinya kelesuan serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian berikutnya yaitu dari Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi dan George Towar Ikba Tawakkal yang berjudul *Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia* yang berkesimpulan bahwasannya Pemilihan kepala desa di Pulau Bawean menjadi pemilihan yang menarik bagi masyarakat yang Induk pemerintahannya adalah Kabupaten Gresik. Tidak adanya pembangunan yang signifikan layaknya Gresik kota membuat masyarakat Pulau Bawean merasa terasingkan dengan apa yang dimiliki daratan Gresik, sehingga masyarakat mempunyai persepsi dengan adanya pemilihan umum yang selama ini menjadi syarat demokrasi tidak berdampak pada masyarakat. Pemilihan kepala desa memiliki partisipasi yang tinggi karena masyarakat Bawean menaruh harapan besar pada pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi pemilihan yang sangat disenangi oleh masyarakat Bawean karena permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta kemauan masyarakat hanya pemerintah desa yang paham dan mengerti, sehingga rumusan kebijakan pemerintah desa benar-benar pro terhadap masyarakat. Melalui pemilihan kepala desa masyarakat Bawean berharap adanya perubahan atau pembangunan yang menjadi tempat tinggal masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penulis meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya dimana lebih menekankan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Berbeda dari Indra Norhayati, Marselina Kareth serta Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi dan George Towar Ikbal Tawakkal. Selain itu penelitian yang penulis lakukan lebih terbaharui dibanding penelitian-penelitian tersebut sehingga hasil dari penelitian ini lebih valid dan terbaru.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta hambatan apa saja yang menjadi faktor dalam terhambatnya partisipasi masyarakat tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Distrik, Kepala Kampung (sebanyak 2 orang), Masyarakat (sebanyak 5 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua menggunakan teori dari Milbarth dalam Maran. Teori tersebut memiliki 2 dimensi yaitu Faktor Pendukung dimana indikatornya adalah adanya rangsangan politik, karakter pribadi, karakter sosial, lingkungan sosial dan pendidikan politik. Sedangkan dimensi kedua yaitu Faktor Penghambat memiliki indikator kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemula yang otonom dan dukungan yang kurang dari lingkungan. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Adanya Rangsangan Politik

Sepanjang perjalanan pergantian kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya belum ada rangsangan politik baik dari pemerintah terhadap masyarakat, maupun dari masyarakat itu sendiri. Tidak pernah ada rangsangan politik karena sejauh ini tidak adanya sistem pemilihan yang dilakukan, mulai dari pembentukan tim pemilihan kepala kampung, pendaftaran calon kepala kampung, kampanye calon kepala kampung, pemilihan hingga mendapatkan hasil siapa yang menjadi kepala kampung. masyarakat di Kabupaten Jayawijaya sama sekali belum mendapatkan maupun merasakan rangsangan politik dalam Pemilihan Kepala Kampung. Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa Kepala Kampung akan dipilih langsung oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati. Sistem pemerintahan yang dijalankan dapat dikatakan menggunakan sistem otoriter karena dibuatnya keputusan langsung oleh induk organisasi, dan juga karena kepentingan segelintir orang untuk menduduki jabatan. peneliti dapat disimpulkan bahwa, dengan tidak adanya pemilihan langsung dari dan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan pernah mendapatkan atau merasakan rangsangan politik.

3.2 Karakter Pribadi

Karakter pribadi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya sangat tidak mempengaruhi pemilihan kepala kampung, sejauh berjalan masyarakat selalu menerima keputusan yang dibuat oleh para pejabat daerah dengan menunjuk langsung kepala kampung. Biasanya hal ini dilakukan karena kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk jangka panjang, seperti contohnya untuk mengamankan suara satu kampung guna mendapatkan suara pada saat pemilihan bupati dan atau gubernur. Siapapun yang dapat mengamankan suara makan imbalannya akan mendapatkan jabatan. Namun karakter pribadi orang yang menjadi kepala kampung sangat berpengaruh besar dalam jalannya roda pemerintahan kampung, sehingga orang yang ditunjuk oleh kepala daerah harus orang yang benar-benar keturunan asli setempat, orang yang paham benar akan kebudayaan serta adat istiadat tata cara dalam kebudayaan setempat, dan memiliki jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat. Orang yang ditunjuk biasanya juga adalah orang yang sangat berpengaruh di lingkungan kampung.

3.3 Karakter Sosial

Karakter sosial masyarakat kampung khususnya di kabupaten jayawijaya adalah masyarakat yang patuh mendengarkan orang yang dituakan di kampung tersebut atau yang sering kita dengar dengan sebutan kepala suku. Sehingga karakter sosial masyarakat sangat mudah diatur dan diarahkan. Sehingga meskipun kepala kampung dipilih langsung oleh kepala daerah, masyarakat selalu menerima keputusan tersebut karena seringkali yang terjadi adalah kepala daerah langsung melakukan pendekatan dengan para kepala suku dan orang-orang yang dianggap berpengaruh di kampung

tersebut. Sehingga orang-orang tersebut yang akan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat.

3.4 Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial tentang partisipasi masyarakat terbentuk dengan sendirinya, yang mana lingkungan sosialnya adalah menerima dengan baik apa yang telah diputuskan oleh kepala daerah Kabupaten Jayawijaya yang menunjuk langsung Kepala Kampung. Sejahtera ini masyarakat memang sejahtera namun belum sepenuhnya, disebabkan karena kepala kampung biasanya kurang berpendidikan sehingga belum paham dengan baik akan konsep yang maju dan sejahtera sesungguhnya.

3.5 Pendidikan Politik

Pendidikan Politik bagi masyarakat di kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan belum ada sejauh ini, karena jika sudah ada maka masyarakat akan berpartisipasi langsung dalam pemilihan kepala kampung di kampungnya masing-masing. Sekolah dan fasilitas pendidikan yang memadai hanya terdapat di ibu kota kabupaten, sehingga pendidikan belum merata hingga ke kampung-kampung. Kurangnya pendidikan politik di kabupaten Jayawijaya menyebabkan kurangnya partisipasi langsung masyarakat dalam memilih kepala kampungnya sendiri, dan juga masyarakat sangat tidak paham mengenai sistem pemilihan yang sebenarnya ada namun belum pernah dilaksanakan dengan baik dan optimal.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan dari Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana di dalamnya juga berisikan bahwa kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan. Dan karena terlalu banyak kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pemilihan kepala kampung tidak pernah dilaksanakan, dan juga kurangnya pendidikan politik dan lingkungan yang kurang mendukung. Berbeda dari temuan Indra Norhayati (Indra Norhayati, 2013) dimana Komunikasi politik yang dipahami masyarakat desa pongkar mencapai 35%, Kesadaran politik yang dipahami masyarakat desa pongkar 27%, Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang kurang dipahami masyarakat desa pongkar 22%, dan Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yang kurang dipahami masyarakat desa pongkar 16%.

Partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua masih terbilang kurang hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yakni sifat apatis dari masyarakat itu sendiri dan kurangnya sosialisasi politik sama seperti temuan Marselina Kareth (Marselina Kareth, 2016), namun dalam penelitian ini masih ditemukannya upaya dari pemerintah dengan langsung menunjuk kepala kampung tersebut supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

Selain itu, partisipasi masyarakat Kabupaten Jayawijaya masih belum maksimal itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya politik yang ada di Indonesia ini tidak seperti temuan dari Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, George Towar Iqbal Tawakkal (Hasanul Bulqiyah, Sholeh Muadi, George Towar Iqbal Tawakkal, 2019) dimana pemilihan kepala desa di Pulau Bawean menjadi pemilihan yang menarik bagi masyarakat yang Induk pemerintahannya adalah kabupaten Gresik.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dimana masih lemahnya kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, para pemula yang masih memiliki jiwa otonom yang tinggi, dukungan yang kurang dari lingkungan, tidak adanya rangsangan politik bagi masyarakat, dan kurangnya pendidikan politik terlebih khusus tentang pentingnya keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala kampung.

IV. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan belum terlaksananya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana di dalamnya juga berisikan bahwa kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan. Dan karena terlalu banyak kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pemilihan kepala kampung tidak pernah dilaksanakan, dan juga kurangnya pendidikan politik dan lingkungan yang kurang mendukung. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, para pendamping distrik dan pendamping kampung masih belum optimal dan belum tepat sasaran.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kepala Distrik, Kepala Kampung dan masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Milbarth dalam Maran.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, s. (2010). *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* . jakarta: rineka cipta.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Indrawan, r, Yuniawati, p.(2014). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refita Aditama.
- Martono, n. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, w. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
- Hasanul Bulqiyah, S. M. (2019). Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal:. *Jurnal Politik*.
- Kareth, M. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Kampung (suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamuru Utara Kabupaten Maybrat). *Jurnal politik*.